

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

Ismet Ismatullah¹⁾, Tina Kartini²⁾
^{1), 2)}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

The mosque is a non-profit organization whose ownership belongs to the people who are entrusted to the managers (takmir). The mosque organization is a non-profit organization, that is, in running a business is not looking for profit, but solely to serve the interests of the ummah. Modal owned by the mosque is usually also quite large, there is a plot of land and building value, as well as equipment and equipment in the mosque. The source of mosque income usually consists of Zakat, Infaq, Shodaqoh and Waqof and the source of mosque expenditure consists of routine costs (electricity, water), hygiene costs, Islamic activity costs ie activities undertaken to commemorate the great day of Islam Maulid Nabi SAW, Ramadan safari, and etc., funding the repair of mosque equipment and so forth. Transparency and accountability are vital in accounting for all activities related to the collection and distribution of funds, including in the management of mosque funds. To maintain public trust where the mosque is a holy place and furthest from the things that are not honest and sinful, but on the other hand

The research is conducted into quantitative research and processed using SPSS version 22 statistical program. The data used in this study using primary data derived questionnaires distributed to students who then processed and analyzed to obtain results about the object and can be drawn conclusions.

From the research that has been done can be concluded that the transparency does not affect the empowerment of people around the mosque, it can be seen the value of t test for the t^{hitung} transparent variable of 1.949 while the value of t for t^{tabel} of 2.048. As for the accountability variable obtained t value for t count of 5.246 (above the t^{tabel} value of 2.048) so that accountability is said to have a role in the empowerment of people around the mosque. Simultaneously, the two variables have an important role in empowering the people around the mosque this can be seen from the value of F^{hitung} obtained by 20,910 compared with the value of F^{tabel} of 3.231

Keywords: mosque accounting, non-profit organization, transparency, accountability.

PENDAHULUAN

Sukabumi berdiri sejak tahun 1815, dimana Visi Kabupaten Sukabumi di tahun 2017 ini adalah Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri. Salah satu program Kabupaten sukabumi yang sudah berjalan adalah Gerakan Memakmurkan Mesjid (GMM) sudah digiatkan mulai tahun 2012 lalu. GMM ini salah satunya menggiatkan masyarakat untuk mengoptimalkan masjid sebagai pusat pengelolaan zakat infak dan shodaqah (ZIS), keberadaan ZIS dimesjid-mesjid ini yang nantinya dapat mejadi solusi untuk mengatasi masalah umat

diantaranya adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Masjid dibentuk dalam suatu organisasi yang terdiri dari struktur organisasi yang memiliki tugas nya masing-masing dalam mengelola masjid, termasuk didalamnya pengelolaan dana Masjid. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan sekelompok masyarakat tertentu. Kebanyakan pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Mesjid menduduki posisi sentral dalam Islam dan kehidupan kaum Muslimin,

tidak hanya dalam ibadah (solat), tetapi dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin karena mesjid juga berperan sebagai salah satu symbol eksistensi keberadaan Islam. Mesjid pada saat ini banyak digunakan sebagai pusat penerimaan zakat infak shodaqah yang berpotensi besar untuk memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara penggalangan dana maupun penyediaan fasilitas.

Organisasi mesjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dimana kebanyakan mesjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola mesjid. Mesjid merupakan organisasi nonlaba (termasuk organisasi pengelola mesjid) yang cenderung menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu manajemen nya harus dapat dipercaya, menganut transparansi dan selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Al-Qur'an dan Al-Hadist mengajarkan kita untuk mengembangkan suatu manajemen pengelolaan mesjid yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Pengelolaan mesjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju pada sistem manajemen modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Trasparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat vital dalam mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana termasuk dalam pengelolaan dana mesjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dimana mesjid merupakan tempat yang suci dan terjauh dari hal-hal yang tidak jujur dan berdosa, tapi dilain pihak Kehidupan keagamaan dalam Islam dituntut setiap muslim agar tidak bersifat

riya sehingga banyak sekali pada penyumbang mesjid yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Selain itu banyak sekali mesjid yang tidak membuat laporan keuangan secara akuntabilitas dan periodik. ditambah masih menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dalam pencatatannya.

Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga Nirlaba lainnya masih dianggap tidak lazim. Walaupun tidak lazim, penelitian tentang praktek akuntansi dalam lembaga keagamaan sudah banyak sekali dilakukan diantaranya Dahnil Anzar (2011) dalam SNA XIV tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di mesjid dimana disimpulkan bahwa dalam konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan mesjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan mesjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Dan akuntan dimesjid tempat peneliti dapat masuk dan berperan secara maksimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan marsdenia (2015) yang menyimpulkan bahwa mesjid belum menerapkan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangannya, mencatat keuangan dengan menggunakan cash basis dan akuntansi yang sangat sederhana, sudah membuat laporan arus kas sederhana, tidak ada intruksi dari pemerintah mengenai penggunaan PSAK 45, jemaah mesjid masih riskan dalam meminta transparansi keuangan mesjid. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penulis sangat menekankan kepada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana mesjid yang akan dilakukan dengan metode kuantitatif. Yang diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan kemampuan dan potensi manajemen pengelolaan dana mesjid dan keinginan

dan aspirasi jamaah masjid yang penulis teliti.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid ?
2. Bagaimana praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid ?
3. Hambatan apa saja yang muncul saat pelaksanaan pengelolaan dana masjid ?

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Keuangan Organisasi

Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakteristik khusus yang mendasari perbedaan tersebut menurut PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi keuangan nirlaba terutama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Dalam organisasi nirlaba, karakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis.

Pada organisasi nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis. Tahapan operasi pada organisasi nirlaba dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan, berbeda dengan entitas bisnis yang memiliki pola yang lebih menyerupai siklus atau perputaran bentuk uang. Misalnya untuk entitas bisnis yang bergerak di perdagangan, siklus operasi

mereka adalah pembelian persediaan/pengakuan hutang – pembayaran hutang /uang tunai – penjualan /pengakuan piutang – penagihan piutang /uang tunai masuk- pembelian persediaan masuk-/pengakuan hutang baru, dst. Sedangkan, pada pola pengelolaan keuangan, organisasi nirlaba kebanyakan mengenal prosedur pemberian dan pertanggungjawaban uang muka sebagai prosedur keuangan utama dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Pada sisi akuntansi, organisasi nirlaba secara umum mengambil kebijakan konservatif dengan memandang kontrak hibah dari lembaga donor sebagai ‘kontrak sosial’ yang walaupun kontrak hibah menyebutkan jumlah kesepakatan hibah tertentu, namun perlakuan akuntansi hanya akan membukukan pendapatan pada saat benar-benar diterima dan sebesar jumlah penerimaan tersebut. Berbeda dengan entitas bisnis yang membukukan pendapatan pada saat kontrak diterima dengan jumlah sebesar nilai kontrak yang disepakati. Perlakuan ini menyebabkan organisasi nirlaba harus menggunakan metode pencatatan berbasis kas yang memodifikasi (cash basis modified), dan bukannya basis aktual sepenuhnya layaknya entitas bisnis.

Standar pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba di Indonesia secara kelembagaan (bukan hanya perproyek atau pun pendonor) telah diatur khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang dihasilkan pada 23 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2000.

Terbitnya PSAK 45 tersebut mengandung konsensus penerapannya dalam proses penyusunan Laporan Keuangan bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia. Paparan singkat atas mencoba menjelaskan betapa khususnya karakteristik pengelolaan keuangan pada Organisasi Nirlaba di Indonesia.

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir). Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya juga cukup besar, terdapat sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam masjid. Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin (listrik, air), biaya kebersihan, biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam Maulid Nabi SAW, safari Ramadhan, dan lain sebagainya, dana perbaikan peralatan masjid dan lain sebagainya.

Transparansi Publik

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi public, yaitu:

Menurut andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:

“keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public”

Menurut Hafiz (2000) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:

“keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang

dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pengelola dalam hal ini pengurus masjid kepada masyarakat atau public dalam mengakses informasi secara menyeluruh dan dapat mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dititipkan oleh public kepada pengelola masjid berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dimensi Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh tentang pengelolaan dana masjid yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai, menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 Aspek:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Menurut Krina (2003) indicator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan public

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

2. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. . Sesuai dengan firman Allah: Surat Yusuf :55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۗ ٥٥
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"

3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan. Dalam

menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

4. Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

6. Petugas yang berwenang atau bertanggung jawab

7. Petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan.

8. Lokasi pelayanan

Tempat dan lokasi diusahakan harus tetap dan tidak berpindah pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

9. Janji pelayanan

Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk didalamnya mengenai standar kualitas jasa.

10. Standar pelayanan jasa

Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.

11. Informasi pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sesuai dengan firman Allah

Dalam sebuah surat An- Nisa :4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *accoubtability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (salim 1991) Akuntabilitas (*Accountability*) menurut suherman (2007) yaitu berfungsi seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep *responsibilitas* (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2009). Teori *Clash of Jurisdictional*

(Abbot, 1998) dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2011), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi karena sistem secara praktek dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi lainnya, masing-masing ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain masuk dan melakukan profesi yang mereka kuasai.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:

“akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawab tersebut

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana mesjid merupakan pertanggungjawaban atas segala hal berhubungan arus kas mesjid dimana pengelola mesjid diberikan kewenangan dan menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan disajikan dilaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan sehingga mesjid harus mempunyai suatu system sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public atau masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media massa, maupun media komunikasi personal.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan sistem hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam yang terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : aqidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual). (*Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004*)

Menurut KH Abdullah Zaky Al-Koap prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu :

1). Kewajiban Berusaha

Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak

menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menggantungkan hidup kepada orang lain, untuk itu wajib berusaha dan merubah nasib sendiri, sebagaimana firman Allah yang artinya:

بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri*” (Surat Ar’du:11)

2). Membasmi Pengangguran

Kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.

3). Mengakui Hak Milik

Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.

4). Kesejahteraan agama dan sosial

Menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala Negara Islam. Yang diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin.

5). Beriman kepada Allah SWT

Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT, menafkahkan harta untuk meninggikan syi’ar Islam dan

mengorbankan harta untuk berjihad dijalan Allah SWT. (*Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004*)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dilihat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Pengertian deskriptif menurut Ety *et al* (2007:18) menyatakan sebagai berikut: “metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain”.

Metode asosiatif merupakan metode yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih. Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data dan meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan pendapatan daerah yang kemudian diproses dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Keabsahan hasil penelitian khususnya penelitian sosial ditentukan oleh alat ukur yang digunakan, apabila alat ukur tidak valid maka hasil penelitian tidak dapat dipercaya artinya hasil penelitian tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket wajib dilakukan uji validitas (kesahihan) dan uji reliabilitas (keandalan).

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan. Instrumen dikatakan absah apabila mampu mengukur apa

yang ingin diungkapkan variabel-variabel yang diteliti. Pengujian validitas menggunakan formula korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = Koefisien validitas

x = Skor salah satu pertanyaan

y = Total skor pertanyaan

n = Jumlah responden

Standar keputusan validitas r hitung \geq rtabel artinya jika perhitungan validitas hasilnya lebih dari rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid atau memiliki keabsahan dan dapat digunakan sebagai alat pengambilan data, tetapi jika kurang dari nilai rtabel maka item pertanyaan tidak dapat digunakan sebagai alat pengambilan data.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan ketepatan (keterandalan) alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji reliabilitas instrument dengan metode *Cronbach's Alpha*. Metode ini akan mencari reliabilitas instrumen yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran. Rumus yang digunakan adalah

$$r_1 = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum Si}{Si} \right)$$

Dimana:

r_1 = Nilai reliabilitas

$\sum Si$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

Si = Varians Total

k = Jumlah Item

Adapun indikator pengukuran reliabilitas yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $r_1 \geq 0,6$ berarti reliabel, sebaliknya

Jika $r_1 \leq 0,6$ berarti tidak reliable

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik.

2. Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian asumsi untuk mengetahui data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, karena jika tidak berdistribusi normal berarti data hasil penelitian tersebut kurang bisa menggambarkan karakteristik populasinya. Pengujian ini akan dilakukan dengan program SPSS 23 for Windows. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogrov-Smirnov test* dengan kriteria pengujian $\alpha 0,05$ sebagai berikut:

Jika $\text{sig} \geq \alpha$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal

Jika $\text{sig} \leq \alpha$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

Selain menggunakan analisis statistik *Kolmogrov-Smirnov Test*, pengujian normalitas dalam penelitian ini juga akan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan P-Plot, agar hasil pengujian lebih akurat dan data yang telah melewati uji normalitas dapat dijadikan alat ukur untuk dianalisis lebih lanjut pada uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruh variabel independen terhadap variabel independen lainnya dengan menggunakan regresi tersebut. Dalam regresi berganda multikolinier tidak boleh terjadi karena akan mengakibatkan koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan *standart error*-nya tidak terhingga. Pengujian Multikolinieritas akan menggunakan *Variance Inflationfactor* (VIF) dengan kriteria yaitu:

Jika angka tolerance dibawah 0,10 dan $\text{VIF} > 10$ dikatakan terdapat gejala multikolinieritas

Jika angka tolerance diatas angka 0,10 dan $\text{VIF} < 10$ dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Glejser Test*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji

ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

3. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011)

b) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi sama dengan nol. Uji signifikansi meliputi pengujian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan serta koefisien regresi parsial spesifik. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan statistik F.

Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011).

Uji F dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - \varepsilon)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

ε = *standart error*

k = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Apabila signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi berganda dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Analisis koefisien determinasi adalah suatu analisis yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel yang diteliti, maka dihitung koefisien determinasi (K_d) dengan menggunakan rumus :

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

K_d = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

d) Analisis Regresi Linier Sederhana (Berganda)

Regresi yang variabel independennya terdiri atas satu regresi disebut regresi linier sederhana sedangkan regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih regresinya disebut regresi linier berganda.

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*). Uji hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan software SPSS karena mampu menghasilkan output yang meyakinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

..... (Regresi linier berganda)

dimana :

- Y = variabel dependent
 β_1 = koefisien regresi
 α = konstanta
 ε = standart error
X = variabel independent

Sig pada output *Kolmogorov-Smirnov test* lebih besar dari nilai *alpha* yang ditentukan yaitu 5 %.

Tabel 4

Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Total Transparan	Total Akuntabilitas	Total Pembedayaan Ekonomi Umat
N		30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	42,9667	43,6000	43,8000
	Std. Deviation	3,34750	4,23125	4,06329
Most Extreme Differences	Absolute	,151	,138	,151
	Positive	,115	,128	,121
	Negative	-,151	-,138	-,151
Test Statistic		,151	,138	,151
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c	,152 ^c	,078 ^c

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* semua variabel yang diajukan semuanya lebih besar dari *alpha* 0,05 (5%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel distribusi data dari variabel penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolenieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah jika semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multi kolenieritas, hal ini berarti jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai

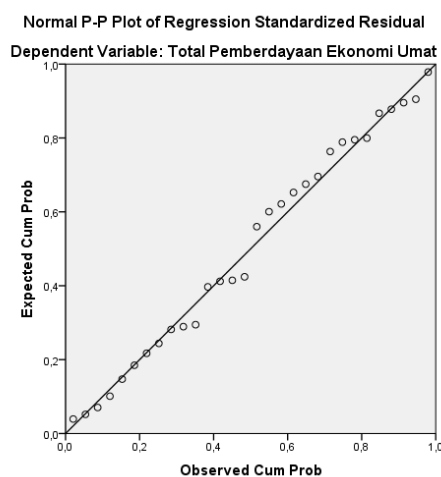
PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu masjid besar yang berada di jalur utama rencana tol bogor sukabumi cianjur (bocimi). Masjid Raudathul Irfan merupakan masjid besar yang berada langsung dibawah pemerintahan Jawa Barat.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau untuk mengetahui apakah data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 2 metode :

- Dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *P-Plot of regression standardized residual* dari variabel independen.



Grafik 1

P-Plot of regression standardized residual

- Dengan menggunakan uji *kolmogrof-smirnov*. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai koefisien *Asymp.*

VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

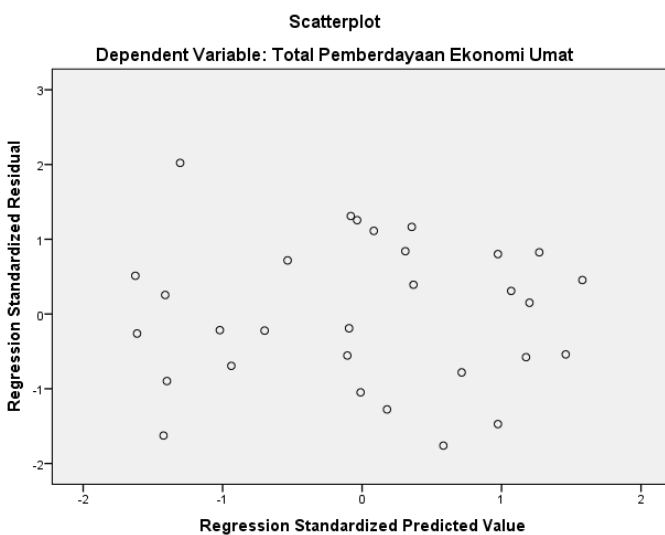
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Total Transparan	,902	1,109
Total Akuntabilitas	,902	1,109

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai transparan sebesar 0,902 yang artinya nilai transparan lebih dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,109 yang artinya nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas. Dalam menentukan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu penelitian, digunakan grafik scatterplot dengan pola sebaran yang tidak teratur diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.



Grafik 2
Sebaran Scatterplot

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	3,021	7,090		,426	,673
	Total Transparan	,300	,154	,247	1,949	,062
	Total Akuntabilitas	,639	,122	,666	5,246	,000

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas dapat di bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon$$

Dimana nilai a sebesar 2,503, nilai b untuk variable stress kerja sebesar 0,807 dan nilai b untuk variable pengalaman kerja sebesar 0,358.

$$Y = 3,021 + 0,300X_1 + 0,639X_2 + e$$

Persamaan linier berganda diatas, dengan dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 3,021 berarti bila variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) tidak di pengaruhi oleh kedua variabel bebas (stress kerja dan pengalaman kerja) atau dengan kata lain bernilai nol maka besarnya nilai kualitas laporan keuangan sebesar 3,021.
- b. Koefisien regresi stress kerja (β_1X_1) bernilai positif menunjukan adanya hubungan searah dengan kualitas laporan keuangan artinya bila stress kerja meningkat sebesar satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan sebesar 0,300.

c. Koefisien regresi pengalaman kerja ($\beta_2 X_2$) bernilai positif menunjukkan adanya hubungan searah dengan kualitas laporan keuangan artinya bila pengalaman kerja meningkat sebesar satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan sebesar 0,639.

d. $e = \text{error}$

Freedom) sebesar jumlah data dikurangi 2 ($30-2=28$) sehingga diperoleh nilai t untuk t_{tabel} sebesar 2,048 (dengan menggunakan fungsi TNIV pada *microsoft excel*, yaitu $t_{\text{tabel}} = \text{TINV}(0.05;28)$). Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.

Table 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	B	Standar Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3,021	7,090		,426	,673
Total Transparan	,300	,154	,247	1,949	,062
Total Akuntabilitas	,639	,122	,666	5,246	,000

Sumber: diolah penulis
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai uji t untuk t_{hitung} variable transparan sebesar 1,949 dan nilai uji t untuk t_{hitung} variable Akuntabilitas sebesar 5,246. Nilai t_{hitung} yang diperoleh ini lalu dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang cari dengan menggunakan bantuan *software Microsoft excel* dengan ketentuan nilai α sebesar 0,05, nilai df (*Degree of*

No	Variabel	t Hitung	t Table	Kesimpulan
1	Transparan (X1) --> Pemberdayaan Ekonomi Umat (Y)	1,949	2,048	$H_0 = \text{diterima}$ $H_1 = \text{ditolak}$ artinya transparansi tidak mempengaruhi pemberdaya ekonomi umat
2	Akuntabilitas (X2) --> Pemberdayaan Ekonomi Umat (Y)	5,246	2,048	$H_0 = \text{ditolak}$ $H_1 = \text{diterima}$ artinya akuntabilitas mempengaruhi pemberdaya ekonomi umat

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Table 8
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290,954	2	145,477	20,910	,000 ^p
	Residual	187,846	27	6,957		
	Total	478,800	29			

Sumber: diolah penulis

Nilai F_{hitung} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yang diperoleh dengan ketentuan nilai α (α) sebesar 0,05, nilai df_1 (*Degree of*

Freedom 1) sebesar jumlah kelompok data dikurangi 1 ($2-1=1$) dan *df2* (*Degree of Freedom* 2) sebesar jumlah data dikurangi 2 ($30-2=28$) sehingga diperoleh nilai *F* untuk F_{tabel} sebesar 3,231 (dengan menggunakan fungsi FNIV pada *microsoft excel*, yaitu $F_{\text{tabel}} = \text{FINV}(0,05;1;28)$). Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($20,910 > 3,231$) sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Variabel	F Hitung	F Table	Kesimpulan
1	Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) --> Pemberdayaan Ekonomi Umat (Y)	20,910	3,231	$H_0 = \text{ditolak}$ $H_1 = \text{diterima}$ artinya transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pemberdayaan ekonomi umat secara bersama-sama

- b) Uji Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel

independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Table 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,608	,579	2,63766

Sumber: diolah penulis

Dari tabel model summary diatas dapat diketahui dapat diketahui nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,608 artinya sumbangan pengaruh dari variabel independen sebesar 60,8% sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Mesjid Raudhatul Irfan

Mesjid Raudhatul Irfan merupakan masjid milik Provinsi yaitu dalam naungan Provinsi Jawa Barat dimana dalam teknisnya Badan Pengelola *Islamic Centre* (BPIC) menunjuk KPM (Koordinator Pengelola Masjid) untuk mengelola masjid sehingga terbentuklah DKM (Dewan Kerja Masjid). Sumber dana masjid Raudhatul Masjid ada 2 yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dari Infak Jamaah Masjid.

Sumber dana pertama, yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya untuk membayar gaji sebagian pegawai harian dan pemeliharaan sarana dan masjid (diantaranya pembelian bahan habis pakai, pembayaran rekening listrik, PDAM, Pembayaran Speedy, dan pembelian bahan-bahan untuk pemeliharaan bangunan masjid). Untuk pengeluaran rutin akan selalu ada pemasukan yg tetap kepada masjid tetapi yang sifatnya tidak rutin masjid Raudhatul

Irfan harus mengajukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan realisasinya tergantung dari persetujuan dari Pemerintah Provinsi yang melalui prosedur birokrasi.

Bantuan dari Provinsi tersebut baru diberikan beberapa tahun terakhir ini yang sebelumnya masjid didanai hanya dari Infak Jamaah sehingga pada awal berdirinya masjid Raudhatul Irfan masih kurang dari segi pendanaan sebatas untuk operasional masjid saja tanpa ada program kerja yang lain tetapi setelah ada bantuan dari provinsi dan semakin berkembangnya Masjid maka dana untuk pengelolaan masjid pun semakin bertambah meskipun dengan usia yang masih relative muda yaitu baru 3 tahun berdiri.

Sumber dana Kedua, dari jamaah yaitu dalam bentuk Infak ada 2 jenis: Yaitu untuk Fakir Miskin dan Untuk pengelolaan Masjid. Infak untuk fakir miskin disalurkan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin yang sudah didata oleh masjid sebagai penerima rutin zakat, kepada masyarakat yang terkena musibah, bakti social, bantuan pendidikan untuk anak tidak mampu dan juga termasuk bantuan untuk rakyat Palestine. infak yang kedua yaitu untuk pengelolaan masjid yaitu disalurkan untuk membiayai operasional masjid sehari-hari yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah provinsi yaitu salah satunya untuk honor khotib, imam, penceramah, pengisi kajian rutin, guru ngaji, dan untuk menunjang program kerja yang sudah disusun oleh Masjid Raya Raudhatul Irfan.

Transparansi pengelolaan dana masjid sudah dilakukan oleh Masjid Raudhatul Irfan melalui pengumuman saldo dana masjid setiap jum'at dan melalui mading (majalah dinding) yang setiap bulan dilaporkan yang dapat dilihat oleh seluruh jamaah masjid. Salah satu bentuk perbaikan dalam pengelolaan dana masjid yaitu terdapat kotak saran untuk memperbaiki pelayanan yang dilakukan oleh masjid. Mengenai transparansi yang belum dilakukan oleh masjid yaitu seperti

belum memiliki prosedur yang jelas dalam penerimaan dan pengeluaran dana masjid. Sehingga penerimaan dana tersebut tidak didokumentasikan dengan baik misalkan belum ada serah terima dari pemberi dan penerima dengan disaksikan oleh orang ketiga dan di dokumentasikan secara tertulis.

Akuntabilitas Dana Masjid dalam hal ini pengelolaan dana masjid dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya. Permasalahan yang ada di Masjid Raudhatul Irfan dalam hal pencatatan dan pelaporan dana mesjidnya yang dipegang oleh Petugas Harian Masjid yaitu Divisi Keuangan yang bukan seorang Akuntan tetapi seorang Sarjana Pendidikan Agama Islam sehingga dalam Pencatatannya masih jauh dari standar akuntansi. Hal tersebut akan sangat menghambat petugas untuk melakukan pelaporan sehingga yang terjadi laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi hanya dalam bentuk sederhana saja yaitu seperti penerimaan dan pengeluaran kas nya saja.

Pembina Dewan Kemakmuran Masjid adalah salah seorang dosen STIE di sukabumi telah memberikan nomor-nomor akun dalam rangka penggolongan biaya, tetapi karena kurangnya pembinaan kepada divisi keuangan pelaksanaannya belum maksimal. Pencatatan setiap transaksi hanya pengeluaran nya saja yang memiliki dokumen yang lengkap sedangkan penerimaannya belum terdokumentasikan dengan baik.

Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dilakukan secara bulanan dan tahunan tetapi masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku umum sehingga apabila dibaca oleh para investor akhirat (Jamaah) maka belum dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelaporannya. Laporan bulanan dan Tahunan rutin dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Format yang masih sederhana hanya menggambarkan penerimaan dan

pengeluaran dana infak saja. Hal tersebut bukan dari sumberdaya yang tidak dipercaya tetapi dari kapasitas sumberdaya yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka untuk itu kami sebagai peneliti selanjutnya ingin melaksanakan pengabdian dalam rangka membantu divisi keuangan dalam membuat system yang sederhana untuk penerimaan dan pengeluaran dana masjid sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan berikut memberikan pelatihan kepada divisi keuangan dalam hal pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan dana masjid sehingga kedepannya hasil pengelolaan dana masjid dapat lebih akuntabel.

Pemberdayaan Ekonomi Umat dimaksudkan untuk mengubah perekonomian jamaah dari yang biasanya penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Pemberdayaan ekonomi umat ini dilakukan agar jamaah lebih produktif dalam menggunakan dana masjid. Masjid Raudhatul Irfan baru mulai melaksanakan kegiatan tersebut tetapi belum optimal, baru sebatas membantu memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil disekitar masjid itu pun belum melalui mekanisme yang sistematis. Pemberian modal yang telah dilakukan tanpa ada tindak lanjut atau monitoring dari implementasi nya sehingga pengelola dana masjid tidak tau seberapa jauh perkembangan usaha pedagang-pedagang kecil tersebut setelah diberikan modal usaha.

Adapun pemberdayaan umat yang dimaksudkan peneliti, dimana dana yang disalurkan oleh masjid dapat membantu jamaah yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak punya kemampuan dalam memulai usaha disini masjid dapat ikut membantu memberikan pinjaman modal dengan akad Qard dan akad ini dituntut jamaah penerima modal untuk mengembalikan modal nya setelah usaha tersebut berjalan dan memperoleh hasil sehingga ada perubahan ekonomi yang signifikan.

Lingkungan disekitar masjid sudah terdapat amal usaha berupa kantin disana hanya terdapat beberapa pedagang saja, kantin yang sudah didirikan oleh masjid belum didayagunakan secara optimal sedangkan kalau dilihat dari luas tanah masih sangat sisa tanah yang dibiarkan kosong. Disini pengelola masjid belum bisa mendayagunakan asset yang ada untuk pemberdayaan ekonomi umat khususnya dilingkungan masjid.

Diharapkan kedepannya masjid apabila dalam pengelolaan dana nya sudah dilakukan dengan baik selanjutnya masjid dapat membuat metode penyaluran dana kepada mustahik dengan lebih sistematis dan produktif di sector riil, sehingga uang yang disalurkan dapat menghasilkan output yang dapat memperbaiki kehidupan ekonomi para mustahik (penerima zakat) dan kedepannya para mustahik tersebut menjadi muzakki (pemberi zakat).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,949 lebih kecil dari 4,048. Transparansi pada masjid Raudhatul Irfan hanya melalui pengumuman saldo dana masjid setiap jum'at dan melalui mading (majalah dinding) yang setiap bulan dilaporkan yang dapat dilihat oleh seluruh jamaah masjid.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t hitung lebih besar dari nilai uji t tabel, yaitu 5,246 sebesar lebih besar dari 4,048. Akuntabilitas Dana Masjid dalam hal ini pengelolaan dana masjid dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya.
3. Secara simultan, variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap

pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu 20,910 lebih besar daripada nilai 3,231 dengan besarnya sumbangan pengaruh dari variabel independent sebesar 60,8% sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tingkat transparansi pengelolaan dana masjid yang tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan umat di lingkungan masjid raidhatul irfan dikarenakan belum memiliki prosedur yang jelas dalam penerimaan dan pengeluaran dana masjid. Sehingga penerimaan dana tersebut tidak didokumentasikan dengan baik misalkan belum ada serah terima dari pemberi dan penerima dengan disaksikan oleh orang ketiga dan di dokumentasikan secara tertulis.
2. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola dana masjid sudah sesuai karena pengurus masjid raidhatul irfan sudah dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya walaupun hanya dilakukan oleh satu orang pengurus saja. Permasalahan yang ada di Mesjid Raudhatul Irfan dalam hal pencatatan dan pelaporan dana mesjidnya yang dipegang oleh Petugas Harian Mesjid yaitu Divisi Keuangan yang bukan seorang Akuntan tetapi seorang Sarjana Pendidikan Agama Islam sehingga dalam Pencatatannya masih jauh dari standar akuntansi. Hal tersebut akan sangat menghambat petugas untuk melakukan pelaporan sehingga yang

terjadi laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi hanya dalam bentuk sederhana saja yaitu seperti penerimaan dan pengeluaran kas nya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaomaneng, I.S., (2012), "Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Gereja", Sripsi (tidak diterbitkan), (online) dalam http://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera57-Zkf1bQR3Gc3J71d2tfuUzlpVc.pdf diakses pada tanggal 25 Januari 2017
- Perkasa, I.R., 2009, "Implementasi Akuntansi pada Organisasi Keagamaan", Skripsi (tidak Diterbitkan), Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, (online) dalam http://eprints.upnjatim.ac.id/542/1/file_1.pdf diakses tanggal 25 Januari 2017
- Simanjutak, Dahnil A dan Yeni Januarsih, 2011, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid, SNA 14, Aceh
- Mangkona, Sri Wardhana Saleh, Walaundouw, Stanley Kho. 2015. "Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Masjid Nurul Huda Kawangkoan". Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Volume. 3 No.2.Juni 2015. ISSN 2303 – 1174
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK No. 45 , No. 109. Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Jusuf, Al. Haryono. 2005. Dasar-dasar Akuntansi. Jilid 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Organisasi Non Laba. Mitra Wacana Media. Edisi 3.

- Fatih, Mohammad.2015. “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada LembagaNirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45 (Study Kasus Pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Anfin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Andrianto, N., 2007. Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e - Government. Bayumedia Publishing. Malang.
- Abdul Hafiz Tanjung, “Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik ”, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Krina, P. 2003. Indikator dan alat ukur prinsip akunbilitas tranparansi dan partisipasi. Jakarta :Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1